

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Abdul Aziz Naufal Faurqi, Henryanto Wijaya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: abdul.125239209@stu.untar.ac.id, henryantow@fe.untar.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menghadapi tantangan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Disparitas tingkat kesejahteraan yang tercermin dari perbedaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar provinsi menunjukkan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari pemerintah daerah tingkat provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2021-2023. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan dana perimbangan dan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Bantuan Sosial

Abstract

As an archipelagic nation with abundant natural resources, Indonesia faces challenges in equitable welfare distribution across regions. The disparity in welfare levels reflected by differences in the Human Development Index (HDI) among provinces indicates that regional financial management has not been optimal in improving the quality of life of the community. This study aims to analyze the effect of original local government revenue, intergovernmental transfers, and social assistance expenditure on public welfare. The data used in this study are secondary data from provincial governments throughout Indonesia in 2021-2023. The data were analyzed using multiple linear regression. The results obtained from this study are that original local government revenue has a positive and significant effect on public welfare, while intergovernmental transfers and social assistance expenditure do not have a positive and significant effect on public welfare.

Keywords: Public Welfare, Original Local Government Revenue, Intergovernmental Transfers, Social Assistance Expenditure



PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator fundamental keberhasilan pembangunan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pencapaian kesejahteraan yang merata menjadi tantangan kompleks mengingat kondisi geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Data United Nations Development Programme (2024) menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 112 dari 193 negara dalam Human Development

Index (HDI) dengan skor 0,713, masih berada di bawah rata-rata negara Asia Tenggara. Lebih mengkhawatirkan, disparitas IPM antar provinsi di Indonesia sangat tinggi, dengan rentang antara 60,44 (Papua) hingga 81,65 (DKI Jakarta) pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama tentang pengentasan kemiskinan dan tujuan kesepuluh tentang pengurangan ketimpangan, masih menghadapi hambatan signifikan (Ghozali, 2018; Sudirman & Tantuka, 2024).

Fenomena kesenjangan kesejahteraan antar daerah ini menjadi paradoks mengingat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pada akhir tahun 2024, Badan Informasi Geospasial Indonesia (2024) merilis informasi mengenai peningkatan jumlah pulau di Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Banyaknya pulau di Indonesia memberikan peluang bagi negara untuk memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Kekayaan sumber daya menjadi potensi tersendiri untuk mendorong roda usaha dan perindustrian. Keuntungan ini menjadi stimulan bagi pemerintah Indonesia untuk menjalankan perekonomian nasional (Amelia & Khoirudin, 2023).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional adalah efisiensi berkeadilan dengan segala kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terlaksananya prinsip efisiensi keadilan dapat diwujudkan dengan mengatasi kesenjangan yang ada pada setiap daerah di Indonesia. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah ini disebut sebagai otonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah melalui hak otonomi daerah memiliki kekuasaan terhadap sumber daya alam daerah dan dapat melakukan pengelolaan sesuai dengan batasan kewenangan yang telah diatur. Dengan wewenang tersebut, pemerintah daerah dapat lebih maksimal dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya karena pemerintah daerah lebih mengetahui potensi daerah yang dipimpinnya serta sistem pengelolaan yang tepat pada sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut diolah dengan tepat untuk menghasilkan pendapatan yang ditujukan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat (Sulastri & Efendri, 2021).

Namun pada kenyataannya, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia. Alfiantsyah dan Prasetya (2021) melalui penelitiannya terhadap kebijakan pembangunan Provinsi Papua mengungkapkan beberapa keunggulan geografis dari provinsi itu tersendiri. Papua merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Dari segi faktor produksi, Provinsi Papua memiliki sumber daya mineral yang tinggi, hasil hutan yang berlimpah, dan aliran sungai yang besar. Pemanfaatan faktor-faktor produksi tersebut dapat dibangun menjadi sebuah industri tersendiri bagi masyarakat Papua terutama di bidang pertambangan. Kekayaan alam mineral yang dimiliki akan meningkatkan produktivitas industri tambang dalam menghasilkan komoditas. Hasil komoditas ini kemudian dapat dijual sebagai pendapatan daerah Provinsi Papua. Dari segi pariwisata, Provinsi Papua

memiliki keunggulan pada keindahan alam dan keberagaman jenis fauna. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Papua. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Keuntungan potensi sumber daya yang dimiliki Provinsi Papua tercermin pada tingginya tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Putra & Dewi, 2018). Pada tahun 2023, Provinsi Papua memiliki realisasi PAD sebesar 770 miliar rupiah. Torehan ini merupakan kedua tertinggi dibandingkan dengan realisasi PAD provinsi lainnya di wilayah timur (sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2023 Audited). Ironisnya, perolehan PAD yang tinggi tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua justru memiliki peringkat terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah timur (Azfirmawarman et al., 2023)

Selain melakukan pengelolaan terhadap pendapatan daerah, pemerintah daerah melaksanakan belanja daerah untuk mendanai segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu jenis belanja yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat adalah belanja bantuan sosial (Kireina & Octaviani, 2021; Mufidah, 2021). Belanja bantuan sosial merupakan belanja yang dianggarkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial tertentu. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pada masyarakat daerah sehingga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah secara umum (Nasrullah & Annisa, 2021).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang paling sering disorot perihal program bantuan sosial untuk masyarakatnya. Hal ini terjadi karena isu kemiskinan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu isu yang selalu menjadi perbincangan pada media maupun forum resmi. Strategi penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai bantuan oleh Pemerintah Jawa Tengah (Budianto, 2022). Bantuan dari segi ekonomi dilakukan dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagai modal usaha kegiatan ekonomi. Bantuan dari segi pendidikan dilakukan melalui penyediaan program pendukung pendidikan seperti program sekolah gratis dan program beasiswa miskin. Keseluruhan program bantuan sosial tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara umum. Namun hasil pemberian bantuan sosial tersebut tidak menggambarkan hasil yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah karena presentase tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih menempati salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa (Budianto, 2022).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pemerintah daerah perlu melaksanakan pembangunan daerah untuk mengatasi masalah kesejahteraan yang terjadi pada masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan yang memadai. Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari PAD. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan cara pemerataan pembangunan bagi masyarakat (Sofyan, 2023). Melalui peningkatan PAD, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri dan Efendri (2021) yang menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. IPM merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini

menyatakan bahwa setiap peningkatan PAD pada suatu daerah akan meningkatkan IPM. Penelitian Wibisono, Suprayitno, dan Asnawi (2024) juga memiliki hasil yang serupa bahwa setiap peningkatan PAD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, penelitian Harmayanti, Semaila, Rahman, dan Manulusi (2021a) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Riviando dkk. (2019a) juga sepakat bahwa PAD tidak terbukti berpengaruh terhadap IPM. Peningkatan dari PAD tidak memiliki andil dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya PAD terhadap peningkatan IPM disebabkan oleh pengelolaan PAD oleh pemerintah belum optimal.

Selain PAD, salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi . Pemberian dana perimbangan memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi pada setiap daerah (Fitrawaty, 2023; Ina & Hudang, 2024). Alokasi dana perimbangan pada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sulastri & Efendri, 2021). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosita dan Sutrisna (2018) menyimpulkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengharapkan alokasi dana anggaran digunakan dengan baik dalam pelaksanaan belanja daerah. Sementara itu, penelitian Putra dan Dewi (2018) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa alokasi anggaran pada dana perimbangan belum mampu meningkatkan komponen kualitas sumber daya masyarakat daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Pemerintah daerah tidak bisa hanya berfokus pada pengelolaan pendapatan daerah. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah juga melakukan berbagai program untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat melalui program bantuan sosial. Program bantuan sosial ini tercantum pada belanja bantuan sosial pada struktur APBD. Pengalokasian belanja bantuan sosial secara tepat juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah (Tang et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Tamara dan Yenniwati (2020a) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang bantuan sosial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah di bidang bantuan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum namun kenaikan ini tidak terjadi secara stimulan. Hal ini disebabkan karena program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah masih bersifat kuratif (penyembuhan) seharusnya program bantuan sosial yang dilaksanakan lebih bersifat preventif (pencegahan). Berlawanan dari penelitian sebelumnya, penelitian Kusuma dan Arif (2022) serta Mufidah (2021) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor bantuan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat daerah tidak berpengaruh melalui program bantuan sosial dikarenakan distribusi yang tidak merata terhadap bantuan yang diberikan.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, terdapat research gap yang signifikan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan (novelty) dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini

menggunakan data panel lengkap dari seluruh 34 provinsi di Indonesia selama periode 2021-2023, memberikan gambaran komprehensif kondisi nasional pascapandemi COVID-19 yang belum banyak diteliti. Kedua, periode penelitian yang dipilih merupakan fase pemulihan ekonomi nasional dimana kebijakan fiskal daerah mengalami penyesuaian signifikan, sehingga relevan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Ketiga, penelitian ini menganalisis secara simultan tiga komponen keuangan daerah (PAD, dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial) yang merepresentasikan aspek pendapatan dan belanja daerah secara komprehensif. Keempat, dengan menggunakan data populasi seluruh provinsi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi negara Indonesia secara keseluruhan dan memberikan implikasi kebijakan yang lebih aplikatif bagi pemerintah pusat dan daerah.

Urgensi penelitian ini semakin penting dalam konteks kebijakan fiskal dan otonomi daerah saat ini. Pertama, dengan implementasi otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari dua dekade, evaluasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi krusial untuk menilai pencapaian tujuan desentralisasi fiskal. Kedua, disparitas kesejahteraan antar daerah yang masih tinggi menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai mekanisme transfer fiskal dan alokasi belanja daerah. Ketiga, dalam era Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat menjadi fundamental untuk merancang strategi pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelima, dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan tantangan fiskal yang semakin kompleks, penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dalam meningkatkan resiliensi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Apakah PAD memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
- b. Apakah dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
- c. Apakah belanja bantuan sosial memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap poin-poin berikut. Menganalisis PAD terhadap kesejahteraan masyarakat. Menganalisis dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menganalisis belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan literatur, dan bagi para ahli dan masyarakat umum sebagai wawasan dan pengetahuan. Manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Menjadi dasar perbaikan bagi pengambilan kebijakan di pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia terutama dalam penyusunan APBD. Mendorong dilakukannya perbaikan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Berkontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Menjadi landasan teoritis bagi bahan acuan penelitian yang akan datang khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik. Menjadi sumber wawasan dan pengetahuan bagi para praktisi di bidang keuangan daerah dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Memberikan informasi bagi masyarakat terkait pengaruh pelaksanaan keuangan daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif dirancang untuk mendeskripsikan karakteristik variabel yang digunakan pada sebuah penelitian serta memiliki tujuan untuk menguji hubungan yang dimiliki oleh setiap variabel secara empiris (Sekaran & Bougie, 2016). Jenis desain penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kuantitatif (Sekaran & Bougie, 2016). Selain itu, penelitian ini menggunakan karakteristik data panel yang bersifat cross-section dan time series karena data diambil dari beberapa bagian pada periode waktu tertentu (Sugiyanto dkk., 2022). Penelitian ini menggunakan data populasi 34 Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada kurun waktu 2021 hingga 2023. Penulis menggunakan data sekunder dalam mendukung pengumpulan data pada penelitian ini. Data mengenai PAD, dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial diperoleh melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap provinsi dan data tingkat kesejahteraan masyarakat daerah yang diukur melalui IPM diperoleh melalui laporan Badan Pusat Statistik melalui halaman resminya. Dengan menggunakan data populasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan menyeluruh dibandingkan penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji analisis data yang terdiri dari uji analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi berganda (Adjusted R-squared), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t). Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi EViews versi 12.

1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat pada tahun 2021-2023. Hasil analisis diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.60806	0.059282	1207.913	0.0000
X1	0.620647	0.191802	3.235874	0.0020
X2	-0.541277	0.159994	-3.383107	0.0013
X3	-0.074719	0.150869	-0.495255	0.6223

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 71,60806 + 0,620647 X1 - 0,541277 X2 - 0,074719 X3 + e$$

Konstanta sebesar 71,60806 artinya jika PAD (X1), dana perimbangan (X2), dan belanja bantuan sosial (X3) bernilai konstan atau 0 maka nilai kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 71,60806.

Koefisien regresi PAD sebesar 0,620647 berarti bahwa, jika nilai variabel lain konstan dan nilai PAD memiliki kenaikan sebesar 1% maka variabel kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0,620647%.

Koefisien regresi dana perimbangan sebesar 0.541277 berarti bahwa, jika nilai variabel lain konstan dan nilai dana perimbangan memiliki kenaikan sebesar 1% maka variabel kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0.541277%.

Koefisien regresi belanja bantuan sosial sebesar 0.074719 berarti bahwa, jika nilai variabel lain konstan dan nilai dana perimbangan memiliki kenaikan sebesar 1% maka variabel kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0.074719%.

2. Uji Koefisien Determinasi Berganda (Adjusted R-Squared)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Root MSE	0.455357	R-squared	0.984266
Mean dependent var	71.60806	Adjusted R-squared	0.975466
S.D. dependent var	3.649945	S.E. of regression	0.571700
Akaike info criterion	1.995714	Sum squared resid	19.28358
Schwarz criterion	2.921611	Log likelihood	-58.80072
Hannan-Quinn criter.	2.369565	F-statistic	111.8468
Durbin-Watson stat	1.837559	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan tabel 2, nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,984266 menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD (X1), dana perimbangan (X2), dan belanja bantuan sosial (X3) dapat menjelaskan variabel kesejahteraan masyarakat (Y2) sebesar 98,4266 persen, sedangkan sisanya sebesar 1,5734% dijelaskan oleh variabel lain yang terdapat di luar model penelitian ini.. Ini merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa model yang digunakan memiliki daya jelas yang sangat tinggi dan cocok untuk menjelaskan perilaku variabel dependen dalam konteks yang sedang diteliti.

Selain itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,975466 menegaskan bahwa meskipun telah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen yang digunakan dalam model, tingkat penjelasan model tetap tinggi, yaitu sekitar 97,55%. Adjusted R-squared sangat penting dalam regresi berganda karena menghindari kesalahan interpretasi yang mungkin timbul jika hanya melihat R-squared terutama ketika jumlah variabel independen cukup banyak. Perbedaan yang kecil antara R-squared dan Adjusted R-squared menunjukkan bahwa penambahan variabel dalam model tidak menyebabkan overfitting atau pencocokan berlebihan terhadap data dan sebagian besar variabel dalam model memberikan kontribusi yang relevan terhadap prediksi variabel dependen. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi berganda yang dibangun memiliki tingkat kecocokan yang baik sehingga variabel-variabel independen yang dimasukkan dalam model sudah sangat representatif dalam menjelaskan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, model ini dapat dikatakan memiliki daya prediksi yang kuat dan dapat diandalkan dalam konteks analisis yang dilakukan

3. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Root MSE	0.455357	R-squared	0.984266
Mean dependent var	71.60806	Adjusted R-squared	0.975466
S.D. dependent var	3.649945	S.E. of regression	0.571700
Akaike info criterion	1.995714	Sum squared resid	19.28358
Schwarz criterion	2.921611	Log likelihood	-58.80072
Hannan-Quinn criter.	2.369565	F-statistic	111.8468
Durbin-Watson stat	1.837559	Prob(F-statistic)	0.000000

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F sebesar $0,000000 < 0,05$ atau nilai F hitung sebesar $111,8468 > 3,099$. Melalui hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini layak dan menjelaskan bahwa variabel PAD (X1), dana perimbangan (X2), dan belanja bantuan sosial (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y). Hasil ini memperkuat validitas model yang telah dibangun dan menunjukkan bahwa kombinasi ketiga variabel independen tersebut mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan variasi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam ruang lingkup penelitian ini.

4. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4. Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71.60806	0.059282	1207.913	0.0000
X1	0.620647	0.191802	3.235874	0.0020
X2	-0.541277	0.159994	-3.383107	0.0013
X3	-0.074719	0.150869	-0.495255	0.6223

Uji t berdasarkan pada tabel 4 diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut.

- Pada variabel PAD (X1), nilai probabilitas t diperoleh sebesar $0,0010 (0,0020/2) < 0,05$ atau nilai t hitung sebesar $3,235874 > \text{nilai } t \text{ tabel yaitu } 1,662$ dan nilai koefisien bernilai positif sebesar $0,620647$. Berdasarkan hasil tersebut, maka H1 diterima artinya PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, setiap peningkatan nilai realisasi PAD pada setiap daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut secara umum.
- Pada variabel dana perimbangan (X2), nilai probabilitas t diperoleh sebesar $0,00065 (0,0013/2) < 0,05$ atau nilai t hitung sebesar $3,383107 > \text{nilai } t \text{ tabel yaitu } 1,662$ dan nilai koefisien bernilai negatif sebesar $-0,541277$. Berdasarkan hasil tersebut, maka H2 ditolak artinya dana perimbangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masing-masing daerah.
- Pada variabel belanja bantuan sosial (X3), nilai probabilitas t diperoleh sebesar $0,31115 (0,6223/2) > 0,05$ atau nilai t hitung sebesar $0,495255 < t \text{ tabel yaitu } 1,662$ dan nilai koefisien bernilai negatif sebesar $-0,074719$. berdasarkan hasil tersebut, maka H3 ditolak artinya belanja bantuan sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa program yang dijalankan pemerintah daerah melalui sektor belanja bantuan sosial belum memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

1. Pengaruh PAD terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai rupiah realisasi pendapatan asli daerah yang berhasil diperoleh pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara umum. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri dan Efendri (2021) yang menjelaskan bahwa PAD umumnya digunakan untuk mendanai pembangunan

daerah yang memiliki tujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan PAD yang tepat diperlukan untuk meningkatkan hajat hidup masyarakat.

Putra dan Dewi (2018) melalui penelitiannya menjelaskan lebih lanjut bahwa pengelolaan PAD yang dilakukan secara efektif dan tepat sasaran sangat penting untuk menunjang pembangunan daerah. Peningkatan PAD pada suatu daerah berkontribusi terhadap perluasan ruang fiskal yang dimiliki, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Ketika PAD meningkat, pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih besar untuk mengalokasikan anggaran pada belanja modal yang terwujud pada pembangunan infrastruktur serta sarana publik.

Sri dan Suyana (2019) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan sarana publik memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dalam bidang kesehatan, pemerintah dapat membangun pusat kesehatan masyarakat yang memiliki akses peralatan yang lengkap atau membangun rumah sakit yang dapat diakses untuk seluruh warganya. Dengan dipenuhinya seluruh fasilitas tersebut, kualitas kesehatan masyarakat dapat terjamin secara baik. Dalam bidang pendidikan, pemerintah dapat membangun sekolah gratis dengan fasilitas yang lengkap ataupun dengan pemenuhan sarana publik untuk mempermudah akses ke sekolah sehingga setiap anak yang sedang menjalani pendidikan dapat menimba ilmu secara maksimal. Selain itu, pemenuhan kebutuhan manusia juga dapat dipenuhi melalui peningkatan pelayanan publik yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses dunia pekerjaan. Pembangunan balai latihan kerja yang didukung oleh kurikulum dan pembimbing yang berkualitas dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki setiap warga sehingga akan lebih mudah apabila ingin mencari pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PAD secara optimal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan program-program prioritas pemerintah daerah. Pengelolaan PAD yang dilakukan secara terencana, transparan, dan akuntabel dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari terpenuhinya berbagai dimensi kesejahteraan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, serta pengurangan tingkat pengangguran.

Selain melalui pelaksanaan pembangunan, pengaruh PAD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari struktur yang dimiliki oleh PAD. Fitrawaty (2023) menjelaskan bahwa PAD mencerminkan kemampuan ekonomi asli yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Komponen terbesar penyusun PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua komponen tersebut merupakan pendapatan daerah yang bersifat pungutan bagi masyarakat atas penghasilan atau jasa yang telah diterima. Peningkatan kedua komponen tersebut dapat diartikan sebagai peningkatan daya beli yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang mencerminkan tingginya kesejahteraan masyarakat setempat karena memiliki kemampuan daya beli yang tinggi. Sehingga secara garis besar dapat disimpulkan, setiap peningkatan nilai realisasi PAD yang diperoleh pemerintah daerah mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Apabila ditinjau dari teori agensi, hasil penelitian ini sudah selaras dengan penerapan teori agensi yang menjelaskan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat.

Pemerintah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan aspirasi publik akan berkontribusi pada tercapainya program-program yang relevan dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Keberhasilan implementasi program tersebut akan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai agen dalam teori agensi terbukti penting dalam memenuhi kepentingan masyarakat melalui kebijakan yang efektif dan berkeadilan.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pengujian yang telah dilakukan menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa alokasi dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan pemerataan ekonomi belum sepenuhnya mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Dana perimbangan merupakan salah satu instrumen fiskal yang dirancang oleh pemerintah pusat untuk mendukung desentralisasi fiskal serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang merata di seluruh daerah. Dana ini terdiri atas DAU, DAK, dan DBH yang keseluruhannya ditujukan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang relatif seimbang. Namun, dalam praktiknya, tidak semua daerah berhasil memanfaatkan dana perimbangan ini secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Putra dan Dewi (2018) menyebutkan bahwa penyaluran dana perimbangan belum berimplikasi langsung pada perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah, terutama yang berkaitan dengan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pengangguran.

Ketidakmampuan dana perimbangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dari alokasi penggunaan setiap komponen dana perimbangan oleh pemerintah daerah. Salah satu komponen yang terdapat pada dana perimbangan adalah dana alokasi umum. Sulastri dan Efendri (2021) menyatakan bahwa penggunaan dana alokasi umum pada pemerintah daerah masih didominasi oleh pemenuhan belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan jenis belanja yang digunakan sebagai pemberian kompensasi terhadap pegawai yang bekerja di pemerintahan. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak terdapatnya dampak yang signifikan secara umum terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah. Dengan demikian, pemanfaatan DAU belum menunjukkan kontribusi yang nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Komponen lain yang terdapat pada dana perimbangan adalah dana bagi hasil yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pendapatan yang bersumber dari wilayah masing-masing daerah. Penelitian Rahmayanti dan Pratiwi (2018) menjelaskan bahwa penggunaan DBH belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satu penyebab utama dari rendahnya efektivitas DBH adalah masih adanya intervensi pemerintah pusat dalam menentukan arah dan prioritas penggunaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan yang memadai dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakatnya. Ketidakfleksibelan ini pada

akhirnya menghambat optimalisasi pemanfaatan dana tersebut, sehingga alokasi DBH belum mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah

Selain DAU dan DBH, komponen lain dari dana perimbangan yang juga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dana alokasi khusus. Secara konseptual, DAK dirancang untuk membiayai program atau kegiatan tertentu di daerah yang menjadi prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Namun Sulastri dan Efendri (2021) menyatakan bahwa dalam implementasinya, banyak dari program-program yang didanai oleh DAK bersifat jangka panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menunjukkan hasil yang nyata. Akibatnya, manfaat dari kegiatan yang dibiayai melalui DAK tidak serta-merta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam jangka pendek. Selain itu, karena sifatnya yang top-down dan ditentukan oleh kebijakan nasional, ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan alokasi DAK dengan kebutuhan spesifik lokal menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara program yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan riil masyarakat setempat. Dengan demikian, efektivitas DAK dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah masih perlu dikaji dan dievaluasi secara lebih mendalam.

Apabila dianalisis melalui perspektif teori agensi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara pemerintah daerah selaku agen dan masyarakat sebagai prinsipal belum mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar dari teori agensi secara optimal. Dalam teori agensi yang dijelaskan oleh Bergman dan Lane (1990), agen seharusnya bertindak mewakili kepentingan prinsipal dengan memaksimalkan manfaat serta mengurangi risiko ketidaksesuaian tujuan antara kedua belah pihak. Namun, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola dan memanfaatkan alokasi dana yang bersumber dari pemerintah pusat secara efektif dan efisien guna mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan. Alokasi dana tersebut, yang idealnya difokuskan untuk program-program pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial ekonomi, belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kegagalan dalam mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban antara pemerintah daerah sebagai agen dengan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, belum terwujudnya keseimbangan kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam konteks pembangunan manusia mencerminkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang seharusnya menjadi landasan dalam hubungan keagenan antara pemerintah dan masyarakat.

3. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil probabilitas menunjukkan bahwa variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil tersebut dapat menjelaskan bahwa setiap alokasi belanja yang ditujukan untuk bantuan sosial belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Selaras dengan hasil tersebut, Kusuma dan Arif (2022) memiliki hasil penelitian yang sama bahwa belanja bantuan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kusuma dan Arif (2022) menjelaskan bahwa pemberian bantuan sosial belum berjalan efektif karena poses distribusi belum dilakukan secara merata dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Dalam praktiknya, proses penyaluran bantuan sering kali tidak berdasarkan data yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga penerima bantuan tidak selalu merupakan individu atau kelompok yang benar-benar berada dalam kondisi membutuhkan. Di samping itu, penelitian Mufidah (2021) menyebutkan bahwa aparaturnya yang berperan dalam pendistribusian bantuan sosial seringkali kurang memahami mekanisme distribusi akibat minimnya pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Akibat dari ketidaktepatan sasaran ini, program bantuan sosial yang seharusnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh menjadi kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Selain itu, Kusuma dan Arif (2022) menjelaskan bahwa penyusunan program bantuan sosial masih belum didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif dan matang. Hal ini mengakibatkan sejumlah aspek dalam perencanaan program belum sepenuhnya menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya integrasi antara perencanaan kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, seharusnya pemerintah mampu merancang program bantuan sosial yang tidak hanya relevan secara administratif, tetapi juga aplikatif dan adaptif terhadap karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis daerah masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan program yang lebih terarah, partisipatif, dan berbasis data agar implementasinya dapat berjalan secara efektif serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Apabila ditinjau dari perspektif teori agensi, pelaksanaan belanja bantuan sosial di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan antara harapan ideal dalam konsep teoritis dan realitas implementasi di lapangan. Dalam teori agensi yang dikemukakan oleh Bergman dan Lane (1990), terdapat hubungan yang menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak agen bertugas untuk menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat sebagai prinsipal dengan tujuan utama untuk memenuhi kepentingan dan aspirasi mereka. Dalam sistem demokrasi, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara. Salah satu instrumen penting dalam menjalankan mandat tersebut adalah melalui belanja bantuan sosial yang secara teoritis dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana. Apabila dikelola secara tepat dan merata, bantuan sosial dapat berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pelaksanaan belanja bantuan sosial seharusnya mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang secara struktural mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik. Namun, ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip dalam teori agensi dan praktik di lapangan mencerminkan bahwa peran pemerintah sebagai agen belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga tujuan akhir dari belanja bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat dicapai secara optimal.

Di sisi lain, kegagalan pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai agen terhadap kebutuhan masyarakat sebagai prinsipal sangat dipengaruhi oleh kelemahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bantuan sosial yang telah dilaksanakan. Salah satu permasalahan mendasar yang terjadi adalah tidak adanya pemetaan kebutuhan masyarakat secara akurat dan partisipatif dalam proses perumusan kebijakan sehingga program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di berbagai wilayah. Selain itu, kelemahan dalam sistem pendataan dan verifikasi penerima manfaat juga turut menyebabkan tidak tepat sasaran bantuan sosial. Masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan tidak terakomodasi dalam program tersebut. Dalam perspektif teori agensi, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan agen dalam memahami dan mewakili kepentingan prinsipal secara tepat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelaksanaan bantuan sosial yang efektif, efisien, dan berkeadilan, pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola bantuan sosial. Reformasi tersebut mencakup peningkatan kualitas data dan sistem informasi, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta penguatan lembaga pengawasan yang independen dan berintegritas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat menjalankan peran agen secara optimal dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan penelitian Putra dan Dewi (2018) yang menekankan pentingnya alokasi belanja modal untuk infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dan sarana publik juga berkontribusi pada akses layanan pendidikan dan kesehatan (Sri dan Suyana, 2019). Namun, ada penelitian yang bertentangan, seperti Riviando dkk. (2019), yang menyatakan PAD tidak berpengaruh pada kesejahteraan. Dana perimbangan juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan, dengan Sulastris dan Efendri (2021) menjelaskan bahwa alokasi yang didominasi belanja pegawai tidak berdampak positif. Selain itu, intervensi pemerintah pusat menghambat penggunaan DBH (Rahmayanti dan Pratiwi, 2018). Sementara itu, Rosita dan Sutrisna (2018) berpendapat bahwa pengelolaan dana perimbangan yang efektif dapat mempengaruhi kesejahteraan. Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh positif, sejalan dengan penelitian Kusuma dan Arif (2022) yang menyoroti ketidakefektifan proses penyaluran. Mufidah (2021) juga menemukan bahwa peran aparatur dalam program bantuan sosial belum optimal. Namun, ada penelitian yang bertentangan, seperti Tamara dan Yenniwati (2020), yang menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih efektif dalam alokasi dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Alfiantsyah, S., & Prasetya, O. B. (2021). Dampak kebijakan pembangunan di Papua terhadap kesejahteraan masyarakat Papua: Kajian aspek ekonomi dan sosial.
- Amelia, R., Khoirudin, R., Ekonomi, F., & Dahlan, U. A. (2023). Analisis yang

- mempengaruhi foreign direct investment di Indonesia. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 2(1), 553.
- Azfirmawarman, D., Magriasti, L., & Yulhendri. (2023). Indeks pembangunan manusia di Indonesia (Kajian perubahan metodologi penghitungan). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Badan Informasi Geospasial. (2024). Pulau Indonesia bertambah jadi 17.380, mengapa angkanya berubah setiap tahun?
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks pembangunan manusia 2023.
- Budianto, A. (2022). Analisis kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017–2020.
- Fitrawaty. (2023). Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harsono, I., Purnama, I., Firmansyah, M., Irwan, M., & Sutanto, H. (2024a). Pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB tahun 2013–2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Harmayanti, Semailla, B., Rahman, Z., & Manulusi, M. R. (2021a). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Ina, Y. T., & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1234–1245. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2718>
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analysis of regional taxes, regional levies, and results of separated regional wealth management against regional original income of Semarang Regency in 2016–2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 32–37.
- Kusuma, A. P., & Arif, M. (2022). An analysis of the effectiveness of local government expenditure allocations in education, health, social assistance, and per capita income on the human development index in the Pati Residency.
- Mufidah, N. (2021). Efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Sosial dan Sains*, 1.
- Nasrullah, M. A., & Annisa, R. (2021). Analisis bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat Tanah Laut pada masa pandemi Covid-19, 4(2).
- Putra, P. P. M. E., & Dewi, M. H. U. (2018). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(10).
- Rahmayanti, A., & Pertiwi, I. F. P. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan

- dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1).
<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening (Studi empiris pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat tahun 2015–2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17.
<http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>
- Rosita, I. A. P. M., & Sutrisna, I. K. (2018). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business*. John Wiley & Sons.
- Sofyan, V. R. W. (2023). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), 9(1).
- Sri, L., & Suyana, U. M. (2019). The effect of local government own revenue and revenue sharing funds on economic performance and community welfare through capital expenditure of regency/city in Bali Province, Indonesia.
- Sudirman, & Tantuka, Z. (2024). Kinerja kepala desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, 1(1).
- Sulastrri, E., & Efendri. (2021). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015–2019. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 85–96.
<https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i2.572>
- Tamara, Y., & Yeniwati. (2020). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang bantuan sosial dan kesehatan, konsumsi rumah tangga, dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, 2(3), 63–68.
- Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A. F., & Maruli, E. (2022). Pengaruh alokasi dana desa dan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 384–399. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7209226>
- Wibisono, N., Suprayitno, E., & Asnawi, N. (2024). The influence of original local government revenue and capital expenditures on economic growth and community welfare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(01).

